



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: DPR, riwayatmu hari ini
Tanggal	: Kamis, 28 Agustus 2025
Surat Kabar	: Kompas
Halaman	: 6

DPR, Riwayatmu Hari Ini

Syamsuddin Haris

Anggota Dewan Pengawas KPK (2019-2024); Kepala Pusat Penelitian Politik LPI (2008-2014)

Jutaan pasang mata terkesima melihat ratusan anggota DPR berjoget ria saat sesi penutupan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Gabungan DPR-DPD pada 15 Agustus 2025.

B etapa tidak di tengah penderitaan mayoritas rakyat kita yang terimpit kemiskinan, daya beli rendah, lapangan kerja sulit, dan biaya hidup semakin tinggi, para wakil rakyat seolah merayakannya dengan cara yang jauh dari prinsip etika dan moralitas.

Mereka yang berjoget itu bukan hanya tak punya nurani dan empati atas kondisi bangsa yang terpuruk, melainkan juga sangat melukai hati Ibu Pertwi.

Tak ada yang salah wakil rakyat mau berjoget ria. Pergolalannya, Sidang Tahunan MPR dan Sidang Gabungan DPR-DPD adalah forum resmi negara yang berlangsung setelah sekali di tempat yang sakral dan dihormati.

Apalagi, Gedung Nusantara tempat berlangsungnya Sidang Tahunan MPR dan Sidang Gabungan DPR-DPD tersebut but adalah sisi bisu tumbangnya rezim otoriter Orde Baru saat mahasiswa dan puluhan ribu massa rakyat menduduki nya pada 18-19 Mei 1998.

Episentrum korupsi

Tak elok rasanya jika sebagian anggota DPR berjoget ria ketika hasil perjuangan reformasi mahasiswa dan massa rakyat masih jauh panggang dari api.

Karena itu, aksi demo dan unjuk rasa yang berulang di depan DPR, termasuk yang berlangsung pada 25 Agustus 2025, harus dibaca sebagai "peringatan" terhadap rendahnya sensitivitas DPR atas penderitaan rakyat. Sudah terlambat sering kita dikecewakan janji-janji palsu para politisi partai politik di Senayan. Rakyat telah kehilangan harapan terhadap para wakilnya di DPR.

Tidak mengherankan jika tingkat kepercayaan publik terhadap DPR dan partai tak pernah membaik. Survei terakhir yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada Januari 2025, misalnya, mencatat, DPR dan parpol adalah lembaga negara dengan tingkat kepercayaan publik terendah dari 11 lembaga yang disurvei. Sembilan lembaga negara di antaranya secara berurutan adalah Presiden, TNI, Kejaksaan Agung, MK, MPR,

DPD, KPK, pengadilan, dan Polri.

Sebagai wakil rakyat yang memperoleh mandat politik melalui pemilu, tugas para politisi DPR adalah memperjuangkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan yang belum kunjung bisa diwujudkan meski usia RI sudah 80 tahun. Namun, alih-alih berpikir dan berjuang bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan rakyat, mereka justru sibuk membalas pundi-pundi penghasilan dan fasilitas kenyamanan bagi diri para anggota DPR sendiri.

Terakhir, para anggota DPR menerima penambahan tunjangan perumahan senilai Rp 50 juta per bulan di tengah upaya pemerintah mengurangi belanja dalam rangka efisiensi anggaran akibat ketidakpastian ekonomi global. Isu penambahan tunjangan bagi wakil rakyat ini pun memicu protes keras warga.

Padahal, berdasarkan data *Kompas* (25/8/2025), total gaji dan tunjangan anggota DPR sudah cukup besar, sekitar Rp 230 juta per bulan, atau setara 105 kali upah minimum di Banjarnegara, Jawa Tengah, yang hanya Rp 2,17 juta per bulan. Penghasilan anggota Dewan ini pun belum termasuk biaya perjalanan dinas dan honor-honor kehadiran di dalam kubangan korupsi.

Ironisnya, meski penghasilan sudah besar, para politisi partai di DPR hari ini adalah salah satu episentrum korupsi di Indonesia. Secara sadar, sebagian dari mereka justru mencurahkan diri dalam kubangan korupsi.

Begini tingginya tingkat korupsi di

badan-badan legislatif kita, hingga akhir

2023 saja KPK mencatat tidak kurang

dari 344 anggota DPR dan DPRD (provinsi dan kabupaten/kota) ditangkap

sebagai diperiksa KPK karena korupsi.

Sebagian di antaranya bahkan melakuk

kan korupsi secara berjemaah.

Jika dulu korupsi berjemaah hanya

terjadi dan dilakukan anggota DPRD,

akhir-akhir ini korupsi berjemaah juga

berlangsung di DPR.

Selain korupsi pengadaan KTP-e yang

melibatkan 51 anggota Komisi II (periode 2014-2019) yang juga menjerat Ketua DPR Setya Novanto, saat ini 44 anggota Komisi XI DPR (2019-2024)

diduga kuat terlibat korupsi dalam *corporate social responsibility* (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020-2023.

Dua anggota Dewan telah ditetapkan

sebagai tersangka, tetapi belum dilakukan

penahanan atas mereka. Menurut penyidik KPK, dua anggota DPR yang

sdah berstatus tersangka itu mengaku

menerima Rp 28,38 miliar dana CSR BI

dan OJK.

Kinerja buruk

Ironisnya, penghasilan besar dan berbagai fasilitas melimpah yang melekat pada para anggota Dewan itu berlangsung di tengah prestasi minus dan kinerja buruk DPR. Dari segi kuantitas, ternyata hanya 48 undang-undang (UU) yang berasal dari 256 RUU yang disepakati oleh pemerintah dan DPR dalam Prolegnas 2019-2024 yang bisa diselesaikan dan diterbitkan menjadi UU.

Itu artinya hanya 18,75 persen UU yang bisa diselesaikan DPR dari rencana Prolegnas periode 2019-2024. Selebihnya, DPR menyelesaikan 177 RUU kumulatif terbuka, yakni RUU yang diajukan mendadak di luar Prolegnas, kemudian pengesahan perjanjian internasional, pembentukan daerah otonom baru, tindak lanjut putusan MK, dan seterusnya.

Berulang lagi jika kita berbicara kualitas UU produksi DPR, baik kualitas proses maupun hasilnya. Dari segi proses, partisipasi publik secara bermakna kian memburuk. Sebagian RUU bahkan dibatasi secara diam-diam, cenderung tertutup, dan dilakukan tergesi gesi, termasuk UU TNI yang sangat kontroversial. Adapun dari aspek hasilnya, makin banyak UU produksi DPR yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Karena itu, tak heran jika semakin banyak UU yang digugat melalui pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi oleh berbagai elemen masyarakat sipil.

Salah satu UU yang sering dimohonkan untuk diuji oleh MK adalah UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja yang dinilai publik tak berpihak pada kepentingan buruh. Terkait UU TNI yang baru, yakni UU No 3/2025, berbagai elemen masyarakat bahkan sudah mendefinisikan permo-honan uji ke MK sebelum UU tersebut memiliki nomor dan belum terdaftar dalam Lembaran Negara RI.

Apabila penilaian atas kinerja DPR ditinjau dari fungsi kontrol dan pengawas, realitasnya lebih buruk lagi.

Alih-alih mengingatkan pemerintah atas berbagai kebijakan yang keliru, DPR hari-hari ini justru lebih tampil sebagai juru bicara atau "humas" pemerintah ketimbang menjadi perpanjangan aspirasi dan kepentingan rakyat.

Prinsip saling mengawasi secara seimbang (*checks and balances*) yang se-

mestinya diimplementasikan DPR untuk mencegah pemusatkan kekuasaan dan kesewenang-wewenang Presiden hampir tidak pernah digunakan.

Komentar absurd

Di tengah kekecewaan rakyat atas prestasi dan kinerja yang belum membaik dan masih maraknya korupsi di DPR, sejumlah anggota Dewan justru melontarkan berbagai komentar, pandangan, dan usulan yang tak hanya absurd, tetapi juga cenderung nyeleneh dan tak masuk akal. Berbagai komentar dan usulan itu pun akhir-akhir ini menjadi viral di media sosial karena mengandung negatif oleh warganet.

Salah seorang pimpinan Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, misalnya mengusulkan agar KPK berkomunikasi terlebih dahulu dengan pimpinan parpol jika hendak menangkap kader parpol yang terjerat korupsi. Usulan Sahroni dari Partai Nasdem jelas mengingkari hakikat korupsi sebagai kejadian luar biasa yang perlu respons dan penanganan luar biasa pulu sehingga mustahil KPK meminta izin bos parpol sebelum menangkap mereka.

Seorang wakil rakyat lainnya dari PKB, Nasim Khan, mengusulkan pengadaan gerbang kreta khusus bagi perokok. Anggota Komisi VI DPR tersebut entah pura-pura tidak tahu atau tidak sensitif terhadap dampak besar kontaminasi asap rokok bagi mereka yang tidak merokok. Apalagi, jelas kebijakan pemerintah ke depan mengarah pada transparasi publik yang bukan hanya bebas rokok, melainkan juga nyaman dan sehat bagi semua.

Sementara itu, komentar Wakil Ketua DPR Adies Kadir viral di media sosial karena "matematis" wakil rakyat dari Partai Golkar ini dinilai keliru oleh warganet. Adies Kadir semula berpendapat bahwa tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan masih kurang jika diasumsikan biaya kos di Jakarta sekitar Rp 3 juta per hari.

Walaupun akhirnya meralat dan minta maaf, komentar nyeleneh seperti itu tak perlu terjadi jika para wakil rakyat memiliki kepekaan dan benar-benar menyelami denyut nadi dan penderitaan mayoritas rakyat yang diwakili.

Lalu apa yang masih bisa diharapkan dari DPR dan para anggotanya? Sekurang-kurangnya, menurut saya, para wakil rakyat perlu belajar memiliki sensitivitas dan rasa malu agar fenomena berjoget ria serta pandangan absurd dan nyeleneh tidak perlu terulang lagi.

